

# Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 (*Audited*)

**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**

**Gedung F. Kemendikbud Ristek Lantai 6**

**Jalan Jenderal Sudirman. Senayan. Jakarta**

**Laman: *www.lsf.go.id*/ e-mail: *sekretariat@lsf.go.id***

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, Mei 2025  
Sekretaris LSF.

Titik Umi Kurniawati, S.Sos  
NIP. 197009151997032001

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dan Undang-Undang APBN Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Sensor Film adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasi. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan. akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Sensor Film. Di samping itu. laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, Mei 2025  
Sekretaris LSF

Titik Umi Kurniawati. S.Sos  
NIP. 197009151997032001

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN .....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	4
II. NERACA.....	5
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	8
A. Penjelasan Umum.....	8
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	22
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca .....	30
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional .....	37
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	23
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan .....	23
<i>Tabel 3. Perbandingan Realisasi Pendapatan .....</i>	<i>24</i>
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja .....	24
Tabel 5. Perbandingan Rincian Belanja Pegawai .....	26
Tabel 6. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai .....	26
Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang.....	27
Tabel 8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang.....	27
Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal.....	28
Tabel 10. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Moda .....	28
Tabel 11. Rincian Aset Lancar .....	30
Tabel 12. Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Setelah tanggal pelaporan .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
Tabel 13. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas .....	31
Tabel 14. Penyelesaian Kas Lainnya dan Setara Kas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 15. Rincian Persediaan.....	31
Tabel 16. Rincian Aset Tetap .....	32
Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	32
Tabel 18. Mutasi Peralatan dan Mesin .....	33
Tabel 19. Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	34
Tabel 20. Rincian Aset Lainnya .....	34
Tabel 21. Mutasi Aset Tak Berwujud .....	35
Tabel 22. Rincian Aset Tak Berwujud .....	35
Tabel 23. Mutasi Aset Lain-Lain.....	36
Tabel 24. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset dan Amortisasi Lainnya .....	37
Tabel 25. Penyelesaian utang jangka pendek lainnya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 26. Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional .....	38
Tabel 27. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak .....	38
Tabel 28. Rincian Beban Pegawai .....	40
Tabel 29. Rincian Beban Persediaan.....	40
Tabel 30. Rincian Beban Barang dan Jasa .....	41
Tabel 31. Rincian Beban Pemeliharaan .....	42
Tabel 32. Rincian Beban Perjalanan Dinas.....	43
Tabel 33. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	43

Tabel 34. Rincian Kegiatan Non Operasional..... 44

Tabel 35. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas ..... 45

Tabel 36. Rincian Surplus (Defisit) LO ..... 45

Tabel 37. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas ..... 46

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan yang dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas. dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film TA 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.749.335.393

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.45.825.351.176 atau mencapai 93% dari alokasi anggaran Rp.49.017.230.000 pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran yang tidak dapat dicairkan (Blokir Anggaran) senilai Rp.2.371.635.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset. kewajiban. dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023. Jumlah Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.5.946.840.555 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.419.020.416. Aset Tetap sebesar Rp.3.705.206.916 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.822.613.223 Jumlah Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0.

Sedangkan Aset pada 31 Desember 2023 sebelumnya dicatat dan disajikan sebesar Rp.5.813.025.993 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.295.022.375. Aset Tetap sebesar Rp. 4.264.686.895.- dan Aset Lainnya sebesar Rp.1.253.316.723 Jumlah Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.27.544.358.

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp.5.946.840.555. Sedangkan jumlah Ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.785.481.635

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan - LO. beban. surplus/defisit dari operasi. surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa. dan surplus/defisit - LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.2.749.335.357 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.44.671.213.806 sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp.(41.921.878.449). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 36 Sehingga Entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp.(41.921.878.413).

Sedangkan per 31 Desember 2023 adalah PNBPN sebesar Rp.2.748.446.889.- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.39.769.895.875. Sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp.(37.021.448.986) Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.(52.860.701). Sehingga Entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp.( 37.074.309.687).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 5.785.481.635 dikurangi Defisit LO sebesar Rp.( 41.921.878.413) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 42.083.237.333 terjadi kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp.161.358.920. Sehingga Ekuitas entitas Per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.5.946.840.555.

Sedangkan per 31 Desember 2023 Ekuitas awal adalah sebesar Rp.3.896.117.580 dikurangi Defisit LO sebesar Rp.(37.074.309.687) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.38.963.673.742 terjadi kenaikan/penurunan ekuitas Rp.1.889.364.055. Sehingga Ekuitas entitas Per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.5.785.481.635

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat alokasi anggaran yang tidak dapat dicairkan (Blokir Anggaran) senilai Rp.2.371.635.000.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### LEMBAGA SENSOR FILM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024			%	31 DESEMBER 2023		
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PENDAPATAN</b>	B.1							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	2.749.335.393	0,00	-	2.916.616.688	0,00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>2.749.335.393</b>	<b>0,00</b>	-	<b>2.916.616.688</b>	<b>0,00</b>	
<b>BELANJA</b>	B.2							
Belanja Pegawai	B.2.1	11.418.219.000	11.034.414.086	96,64	11.158.354.000	11.083.895.211	99,33	
Belanja Barang	B.2.2	35.369.011.000	32.571.387.250	92,09	28.289.283.000	27.352.664.278	96,69	
Belanja Modal	B.2.3	2.230.000.000	2.219.549.840	99,53	3.454.820.000	3.443.730.941	99,68	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>49.017.230.000</b>	<b>45.825.351.176</b>	<b>93,49</b>	<b>42.902.457.000</b>	<b>41.880.290.430</b>	<b>97,62</b>	

## II. NERACA

### LEMBAGA SENSOR FILM NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/(TURUN ) Rp	%
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>				
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	27.544.358	(27.544.358)	0%
Persediaan	C.1.3	419.020.416	267.478.017	151.542.399	57%
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>419.020.416</b>	<b>295.022.375</b>	<b>123.998.041</b>	<b>42%</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>				
Peralatan dan Mesin	C.2.1	60.459.071.804	59.801.937.914	657.133.890	1%
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	758.769.274	758.769.274	-	0%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(57.512.634.162)	(56.296.020.293)	(1.216.613.869)	2%
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>3.705.206.916</b>	<b>4.264.686.895</b>	<b>(559.479.979)</b>	<b>-13%</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.3</b>				
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	2.052.276.723	1.482.639.223	569.637.500	38%
Aset Lain-Lain	C.3.2	1.292.337.725	6.134.317.725	(4.841.980.000)	-79%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.522.001.225)	(6.363.640.225)	4.841.639.000	-76%
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>1.822.613.223</b>	<b>1.253.316.723</b>	<b>569.296.500</b>	<b>45%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>5.946.840.555</b>	<b>5.813.025.993</b>	<b>133.814.562</b>	<b>2%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>C.4.1</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.4.1</b>				
Utang jangka pendek lainnya	C.4.1	-	27.544.358	(27.544.358)	0%
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>-</b>	<b>27.544.358</b>	<b>(27.544.358)</b>	<b>-100%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>-</b>	<b>27.544.358</b>	<b>(27.544.358)</b>	<b>-100%</b>
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas		5.946.840.555	5.785.481.635	161.358.920	3%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>5.946.840.555</b>	<b>5.785.481.635</b>	<b>161.358.920</b>	<b>3%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>5.946.840.555</b>	<b>5.813.025.993</b>	<b>133.814.562</b>	<b>2%</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## LEMBAGA SENSOR FILM LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/(TURUN) Rp	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1</b>				
<b>PENDAPATAN</b>	<b>D.1.1</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	2.749.335.357	2.748.446.889	888.468	0,03%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.749.335.357</b>	<b>2.748.446.889</b>	<b>888.468</b>	<b>0,03%</b>
<b>BEBAN</b>	<b>D.1.2</b>				
Beban Pegawai	D.1.2.1	11.034.414.086	11.083.895.211	(49.481.125)	-0,45%
Beban Persediaan	D.1.2.2	212.338.245	860.282.849	(647.944.604)	-75,32%
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	15.230.358.772	13.356.646.087	1.873.712.685	14,03%
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	2.946.605.294	2.529.367.920	417.237.374	16,50%
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	14.030.542.540	10.943.977.800	3.086.564.740	28,20%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	1.216.954.869	995.726.008	221.228.861	22,22%
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>44.671.213.806</b>	<b>39.769.895.875</b>	<b>4.901.317.931</b>	<b>12,32%</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(41.921.878.449)</b>	<b>(37.021.448.986)</b>	<b>(4.900.429.463)</b>	<b>13,24%</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.2</b>				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	168.169.799	(168.169.799)	0,00%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		36	-	36	0,00%
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	(221.030.500)	221.030.500	0,00%
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>36</b>	<b>(52.860.701)</b>	<b>52.860.737</b>	<b>-100,00%</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(41.921.878.413)</b>	<b>(37.074.309.687)</b>	<b>(4.847.568.726)</b>	<b>13,08%</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(41.921.878.413)</b>	<b>(37.074.309.687)</b>	<b>(4.847.568.726)</b>	<b>13,08%</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### LEMBAGA SENSOR FILM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		NAIK/(TURUN) RP	%
		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023		
EKUITAS AWAL	E.1	5.785.481.635	3.896.117.580	1.889.364.055	48,49%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(41.921.878.413)	(37.074.309.687)	(4.847.568.726)	13,08%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	42.083.237.333	38.963.673.742	3.119.563.591	8,01%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	161.358.920	1.889.364.055	(1.728.005.135)	-91,46%
EKUITAS AKHIR	E.5	5.946.840.555	5.785.481.635	161.358.920	2,79%

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. Penjelasan Umum

#### A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan Keuangan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan. Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
21. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;

22. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-1/KN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per- 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

## **A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Sensor Film**

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang lembaga sensor film. Lembaga sensor film memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

### **1. Tugas (Pasal 6)**

- a) Melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
- b) Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

### **2. Fungsi (Pasal 7)**

- a) Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;
- b) Penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
- c) Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
- d) Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;

- e) Pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
- f) Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan. dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di indonesia.

### 3. Wewenang (Pasal 8)

- a) Penentuan penggolongan usia penonton;
- b) Pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film
- c) Penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;
- d) Pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk setiap kopi-jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor;
- e) Pembatalan surat tanda lulus sensor;
- f) Pengusulan sanksi administratif kepada pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perfilman; dan
- g) Pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik yang lulus dan yang tidak lulus sensor kepada presiden melalui menteri secara periodik.

### **A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.4 Basis Akuntansi**

Lembaga Sensor Film, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Berbasis akrual Biro Keuangan terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran
- Laporan Operasional (LO)  
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
- Neraca  
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

## **A.5 Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Sensor Film Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.6 Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Sensor Film.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film adalah sebagai berikut:

### **1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## 2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## 3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan. dipakai. atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan. yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - ❖ Harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
  - ❖ Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - ❖ Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

## c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas pemerintah pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan. Jaringan. dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Music Modern)	4 Tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

## 6) **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### 7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### 8) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan. Jaringan. dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Music Modern)	4 Tahun

#### 9) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua. keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi.

Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

## B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan. Tahun Anggaran 2024 Lembaga Sensor Film telah 12 (dua belas) kali melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Rincian revisi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

REVISI KE-	TANGGAL	PAGU
1	7 Desember 2023	49.017.230.000
2	23 Januari 2024	49.017.230.000
3	14 Februari 2024	49.017.230.000
4	20 Februari 2024	49.017.230.000
5	23 April 2024	49.017.230.000
6	3 Juni 2024	49.017.230.000
7	12 Juli 2024	49.017.230.000
8	13 September 2024	49.017.230.000
9	15 Oktober 2024	49.017.230.000

Rincian anggaran awal dan anggaran setelah revisi ke-12 adalah sebagai berikut

Tabel 1. Perubahan Anggaran Per Jenis Belanja

URAIAN	31 DESEMBER 2024			
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	NAIK/(TURUN)	
			JUMLAH Rp	%
<b>Pendapatan</b>	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-	0,00%
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Belanja</b>				
Belanja Pegawai	12.918.219.000	11.418.219.000	(1.500.000.000)	-11,61%
Belanja Barang	33.869.011.000	35.369.011.000	1.500.000.000	4,43%
Belanja Modal	2.230.000.000	2.230.000.000	-	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>49.017.230.000</b>	<b>49.017.230.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

## B.1 Pendapatan

### B.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lembaga Sensor Film untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.2.749.335.393. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan dari Penjualan. Pengelolaan BMN. dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film.

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan

URAIAN	31 DESEMBER 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	36	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	2.749.335.357	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2.749.335.393</b>	<b>-</b>

- Realisasi Pendapatan Lain-lain 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.749.335.357 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK/(TURUN) Rp	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	168.169.799	(168.169.799)	0,00%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36	-	36	0,00%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.749.335.357	2.748.446.889	888.468	3,23%

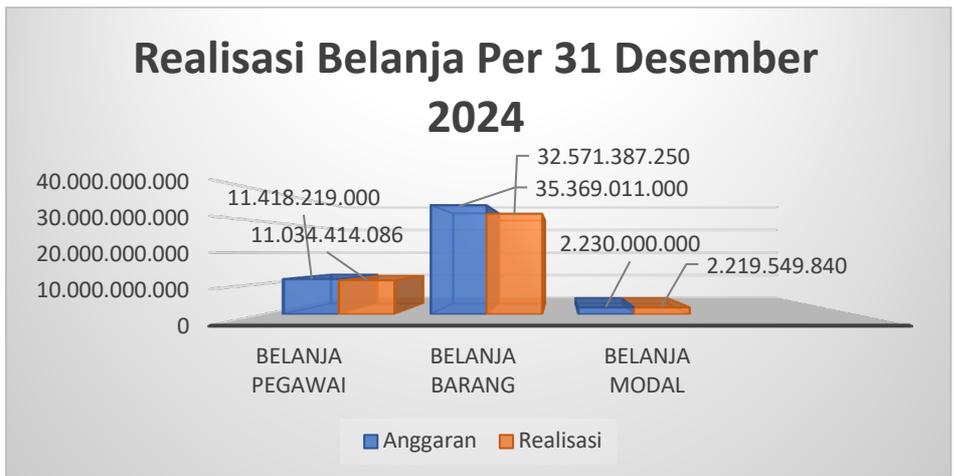
## B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.45.825.351.176 atau 93,49% dari anggaran belanja sebesar Rp.49.017.230.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024			31 DESEMBER 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	11.418.219.000	11.034.414.086	96,64%	11.158.354.000	11.083.895.211	99,33%
Belanja Barang	35.369.011.000	32.571.387.250	92,09%	28.289.283.000	27.352.664.278	96,69%
Belanja Modal	2.230.000.000	2.219.549.840	99,53%	3.454.820.000	3.443.730.941	99,68%
<b>Jumlah</b>	<b>49.017.230.000</b>	<b>45.825.351.176</b>	<b>93,49%</b>	<b>42.902.457.000</b>	<b>41.880.290.430</b>	<b>97,62%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan realisasi Belanja per 31 Desember 2023. Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (4.13) persen. Hal tersebut dikarenakan adanya blokir anggaran senilai Rp.2.371.635.000

#### B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.034.414.086 dan Rp11.083.895.778. Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp49.481.692 atau 0.45% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 di satker Lembaga Sensor Film terdapat beberapa pegawai yang pensiun.

Tabel 5. Perbandingan Rincian Belanja Pegawai  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK/(TURUN) Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.577.163.031	1.497.661.728	79.501.303	5,31%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	9.291.421.125	9.572.913.050	(281.491.925)	-2,94%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	165.829.930	-	165.829.930	0,00%
Belanja Lembur	-	13.321.000	(13.321.000)	-100,00%

Tabel 6. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024			31 DESEMBER 2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.638.496.000	1.577.163.031	96,26%	1.507.785.000	1.497.661.728	99,33%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	9.555.125.000	9.291.421.125	97,24%	9.583.964.000	9.572.913.050	99,88%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	170.082.000	165.829.930	97,50%	-	-	0,00%
Belanja Lembur	-	-	0,00%	66.605.000	13.321.000	20,00%

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp27.352.664.278 dan Rp32.571.387.250. Realisasi belanja barang 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.218.722.972 atau 19,08% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 adanya kenaikan anggaran dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.7.079.728.000.

Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) Rp	%
Belanja Barang Operasional	2.916.465.200	2.881.527.195	34.938.005	1,21%
Belanja Barang Non Operasional	6.777.273.436	4.865.205.867	1.912.067.569	39,30%
Belanja Barang Persediaan	363.880.644	495.838.221	(131.957.577)	-26,61%
Belanja Jasa	5.536.620.136	5.636.941.525	(100.321.389)	-1,78%
Belanja Pemeliharaan	2.946.605.294	2.529.173.670	417.431.624	16,50%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	13.154.605.940	10.076.436.800	3.078.169.140	30,55%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	875.936.600	867.541.000	8.395.600	0,97%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>32.571.387.250</b>	<b>27.352.664.278</b>	<b>5.218.722.972</b>	<b>19,08%</b>

Tabel 8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024			31 DESEMBER 2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	2.981.866.000	2.916.465.200	97,81%	2.952.984.000	2.881.527.195	97,58%
Belanja Barang Non Operasional	7.455.714.000	6.777.273.436	90,90%	4.956.812.000	4.865.205.867	98,15%
Belanja Barang Persediaan	373.833.000	363.880.644	97,34%	497.603.000	495.838.221	99,65%
Belanja Jasa	5.720.653.000	5.536.620.136	96,78%	5.708.601.000	5.636.941.525	98,74%
Belanja Pemeliharaan	2.968.342.000	2.946.605.294	99,27%	2.669.642.000	2.529.173.670	94,74%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.982.670.000	13.154.605.940	87,80%	10.635.547.000	10.076.436.800	94,74%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	885.933.000	875.936.600	98,87%	868.094.000	867.541.000	99,94%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>35.369.011.000</b>	<b>32.571.387.250</b>	<b>92,09%</b>	<b>28.289.283.000</b>	<b>27.352.664.278</b>	<b>96,69%</b>

### B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.219.549.840 dan Rp3.443.730.941 Realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(1.213.730.941) atau (35%) jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran pada belanja modal sebesar Rp(1.224.820.000) dari tahun 2023 dikarenakan adanya pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran pembelian peralatan dan mesin.

Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	R 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	657.133.890	3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	897.068.700	
Belanja Modal Lainnya	665.347.250	

Selanjutnya rincian perbandingan pagu dan realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Moda  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2023			31 DESEMBER 2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	657.221.000	657.133.890	99,99%	3.057.120.000	3.057.020.816	100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	897.069.000	897.068.700	100,00%	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	675.710.000	665.347.250	98,47%	397.700.000	386.710.125	97,24%

### B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp657.133.890 dan Rp3.057.020.816. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(2.399.799.816) atau mencapai (79%) jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 adanya peremajaan peralatan penyensoran berupa DCP Player Projector dan DVD Player di Lembaga Sensor Film sesuai dengan kebijakan.

### B.2.3.2 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp897.068.700 dan Rp0. Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp897.068.700 atas sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena adanya .....

### B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Modal Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp665.347.250 dan Rp386.710.125. Realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp278.637.125 atas sebesar 79.68%. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian Handy Talky. Filling Kabinet. Lemari Arsip. dll

## C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

### C.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing – masing sebesar Rp419.020.416 dan Rp295.022.375. Realisasi per 31 Desember 2024 mengalami penurunan Rincian Aset Lancar sebesar Rp123.998.041 atau 42.03% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023. Rincian aset lancar pada satker Lembaga Sensor Film per 31 Desember 2024 tersaji pada table berikut:

Tabel 11. Rincian Aset Lancar  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Lancar	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK/ (TURUN) Rp	%
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	27.544.358	(27.544.358)	0,00%
2	Persediaan	419.020.416	267.478.017	151.542.399	56,66%
	<b>Jumlah</b>	<b>419.020.416</b>	<b>295.022.375</b>	<b>123.998.041</b>	<b>42,03%</b>

Selanjutnya dibawah ini dijelaskan rincian per jenis aset lancar sebagai berikut:

#### C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tidak ada Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 karena seluruhnya sudah disetorkan ke Kas Negara.

#### C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kasa merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masin-masing sebesar Rp0 dan Rp27.544.358.

Rincian sumber Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Keterangan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/(TURUN) Rp	%
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran				
a	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	27.544.358	(27.544.358)	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>27.544.358</b>	<b>(27.544.358)</b>	<b>0%</b>

### C.1.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp419.020.416 dan Rp267.478.017 Realisasi persediaan mengalami penurunan sebesar Rp151.542.399 atau 57% jika dibandingkan 31 Desember 2023.

Rincian persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Persediaan  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Persediaan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2023	NAIK/(TURUN) Rp	%
Barang Konsumsi	419.020.416	267.478.017	151.542.399	57%
Barang untuk Pemeliharaan	-	-	-	0%
Suku Cadang	-	-	-	0%
Persediaan Lainnya	-	-	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>419.020.416</b>	<b>267.478.017</b>	<b>151.542.399</b>	<b>57%</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

## C.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.705.206.916 dan Rp4.264.686.895. Rincian Aset Tetap Satker Lembaga Sensor Film per 31 Desember 2024 tersaji pada table berikut:

*Tabel 14. Rincian Aset Tetap*  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/(TURUN) Rp	%
1	Tanah	-	-	-	0,00%
2	Peralatan dan Mesin	60.459.071.804	59.801.937.914	657.133.890	1,10%
3	Aset Tetap Renovasi	312.811.175	312.811.175	-	0,00%
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	0,00%
5	Aset Tetap lainnya	445.958.099	445.958.099	-	0,00%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	0,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>61.217.841.078</b>	<b>60.560.707.188</b>	<b>657.133.890</b>	<b>1,09%</b>
	Akumulasi Penyusutan	(57.512.634.162)	(56.296.020.293)	(1.216.613.869)	2,16%
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>3.705.206.916</b>	<b>4.264.686.895</b>	<b>(559.479.979)</b>	<b>-13,12%</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp(57.512.634.162) dan Rp(56.296.020.293). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*  
31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 60.459.071.804	Rp 57.437.896.662	Rp 3.021.175.142
2	Aset Tetap Lainnya	Rp 758.769.274	Rp 74.737.500	Rp 684.031.774
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 61.217.841.078</b>	<b>Rp 57.512.634.162</b>	<b>Rp 3.705.206.916</b>

### C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp60.459.071.804 dan Rp59.801.937.914.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16. Mutasi Peralatan dan Mesin  
31 Desember 2024

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>59.801.937.914</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	657.133.890
Mutasi kurang:		
Hibah Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>60.459.071.804</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(57.437.896.662)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>3.021.175.142</b>

Mutasi peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 terdiri dari mutasi tambah berupa pembelian meubelair ruang studio, TV, AC, layar studio, mic clip on wireless, lampu podcast, lampu LED, dan lensa kamera sebesar Rp657.133.890. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.437.896.662.

### C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp758.769.274 dan Rp758.769.274.

Tabel 17. Mutasi Aset Tetap Lainnya  
31 Desember 2024

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>758.769.274</b>
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Hibah Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>758.769.274</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2024	(74.737.500)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>684.031.774</b>

Mutasi Aset Tetap Lainnya berupa akumulasi penyusutan sebesar Rp74.737.500.

### C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp1.822.613.223 dan Rp1.253.316.723. Rincian Nilai Aset lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada table berikut:

Tabel 18. Rincian Aset Lainnya  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	2.052.276.723	1.482.639.223	569.637.500	38,42%
2	Aset Lain-Lain	1.292.337.725	6.134.317.725	(4.841.980.000)	-78,93%
	<b>Jumlah</b>	<b>3.344.614.448</b>	<b>7.616.956.948</b>	<b>(4.272.342.500)</b>	<b>-56,09%</b>
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.522.001.225)	(6.363.640.225)	4.841.639.000	-76,08%
	<b>Aset lainnya</b>	<b>1.822.613.223</b>	<b>1.253.316.723</b>	<b>569.296.500</b>	<b>45,42%</b>

### C.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp2.052.276.723 dan Rp1.482.639.223.

Aset Tak Berwujud pada Lembaga Sensor Film berupa Pengembangan aplikasi pemantauan, Pengembangan Website, dan Aplikasi Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (E-Sias) Tahun 2024 yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi

terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Mutasi Aset Tak Berwujud  
31 Desember 2024

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1.482.639.223</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	569.637.500
Mutasi kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>2.052.276.723</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(230.175.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>1.822.101.723</b>

Tabel 20. Rincian Aset Tak Berwujud

Jenis Aset Tak Berwujud	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN Rp	%
Saldo awal	1.482.639.223	865.754.098	616.885.125	0,00%
Software		230.175.000	(230.175.000)	0,00%
Aplikasi Pemantauan		49.620.000	(49.620.000)	0,00%
Konten Media Sosial	179.542.500	143.620.125	35.922.375	0,00%
Website Lembaga Sensor Film	196.470.000	99.345.000	97.125.000	0,00%
Aplikasi Administrasi Berbasis Elektronik (E-Sias)	193.625.000	94.125.000	99.500.000	0,00%
	<b>2.052.276.723</b>	<b>1.482.639.223</b>	<b>569.637.500</b>	<b>0,00%</b>

### C.3.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp1.292.337.725 dan Rp1.292.337.725. Realisasi aset lain-lain per 31 Desember 2024 tidak ada kenaikan/penurunan dari 31 Desember 2023. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Mutasi Aset Lain-Lain  
31 Desember 2024

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>1.292.337.725</b>
Mutasi tambah:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Mutasi kurang:	
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	-
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1.292.337.725</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2023	(1.291.826.225)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>511.500</b>

### C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Uang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(6.363.640.225) dan Rp (1.310.641.725). Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset dan Amortisasi Lainnya

Per 31 Desember 2024

No	ASET LAINNYA	Nilai Perolehan	Akumulasi	
			Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
			Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2024
<b>I</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>			
	<b>Saldo awal</b>	1.482.639.223		1.482.639.223
1	Software		230.175.000	- 230.175.000
2	Aplikasi Pemantauan		-	-
3	Konten Media Sosial	179.542.500	-	179.542.500
4	Website Lembaga Sensor Film	196.470.000	-	196.470.000
5	Aplikasi Administrasi Berbasis Elektronik (E-Sias)	193.625.000	-	193.625.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.052.276.723</b>	<b>230.175.000</b>	<b>1.822.101.723</b>
<b>II</b>	<b>Aset Lain-lain</b>			
1	Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.292.337.725	1.291.826.225	511.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.292.337.725</b>	<b>1.291.826.225</b>	<b>511.500</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.344.614.448</b>	<b>1.522.001.225</b>	<b>1.822.613.223</b>

## C.4 Kewajiban

### C.4.1 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

#### C.4.1.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp27.544.358.

## D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

### D.1 Kegiatan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada 31 Desember 2024 Lembaga Sensor Film memiliki Pendapatan-LO sebesar Rp2.748.446.889, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp39.769.895.875, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(37.021.448.986). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp(52.860.701) dan Rp0 sehingga entitas

mengalami Defisit-LO sebesar Rp(37.074.309.687). Selanjutnya disajikan ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Tabel 23. Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
Jumlah Pendapatan Operasional	2.748.446.889	2.325.800.154	422.646.735	18,17
Jumlah Beban Operasional	39.769.895.875	29.157.624.522	10.612.271.353	36,40
<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(37.021.448.986)</b>	<b>(26.831.824.368)</b>	<b>(10.189.624.618)</b>	<b>37,98</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	168.169.799	-	168.169.799	#DIV/0!
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	221.030.500	-	221.030.500	#DIV/0!
<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(52.860.701)</b>	<b>-</b>	<b>(52.860.701)</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(37.074.309.687)</b>	<b>(26.831.824.368)</b>	<b>(10.242.485.319)</b>	<b>38,17</b>

## D.1.1 Pendapatan

### D.1.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.749.335.357 dan Rp2.916.616.688. Rincian pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) Rp	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.749.335.357	2.748.446.889	888.468	0,03%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	168.169.799	(168.169.799)	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>2.749.335.357</b>	<b>2.916.616.688</b>	<b>(167.281.331)</b>	<b>-5,74%</b>

Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film

sebesar Rp2.748.446.889. Pemungutan tarif sensor tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Pelayanan penyensoran tersebut meliputi : Film Nasional. Trailer Nasional. Film Impor. Trailer Impor. Iklan Produk. Televisi. Palwa. Jaringan Informatika. Sarana Promosi. Festival. Kalangan Terbatas. Event. Peninjauan.

Pendapatan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp167.281.331 (5.74) persen dari tahun 2023.

## D.1.2 Beban

### D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai Lembaga Sensor Film pada TA 2024 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi Beban pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.034.414.086 dan Rp11.083.895.778. Realisasi beban gaji per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 0.45 persen dari gaji tahun anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena di satker Lembaga Sensor Film terdapat beberapa pegawai yang pension.

Tabel 25. Rincian Beban Pegawai  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK/(TURUN) Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.577.163.031	1.497.661.728	79.501.303	5,31%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	9.291.421.125	9.572.913.050	(281.491.925)	-2,94%
Belanja Lembur	165.829.930	13.321.000	152.508.930	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11.034.414.086</b>	<b>11.083.895.778</b>	<b>(49.481.692)</b>	<b>-0,45%</b>

#### D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp363.880.644 dan Rp860.282.849. Realisasi beban persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp363.880.644 atau (57,70) persen dari beban persediaan tahun anggaran 2023.

Tabel 26. Rincian Beban Persediaan  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	363.880.644	860.282.849	(496.402.205)	-57,70%
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>363.880.644</b>	<b>860.282.849</b>	<b>(496.402.205)</b>	<b>-57,70%</b>

### D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban barang dan jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.230.358.772 dan Rp13.356.646.087. Realisasi beban barang dan jasa per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.873.712.685 atau 14.03 persen dari tahun anggaran 2023. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran di Tahun Anggaran 2024.

Rincian beban jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Barang dan Jasa  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.470.950.800	2.372.012.780	98.938.020	4,17%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136.536.000	218.160.000	(81.624.000)	-37,41%
Beban Barang Operasional Lainnya	308.978.400	158.615.515	150.362.885	94,80%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	132.738.900	(132.738.900)	-100,00%
Beban Bahan	1.073.195.728	855.344.000	217.851.728	25,47%
Beban Honor Output Kegiatan	416.840.000	424.840.000	(8.000.000)	-1,88%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.287.237.708	3.536.015.367	1.751.222.341	49,53%
Beban Jasa Konsultan	200.000.000	200.000.000	-	0,00%
Beban Sewa	4.101.581.100	3.841.035.200	260.545.900	6,78%
Beban Jasa Profesi	631.985.000	532.600.000	99.385.000	18,66%
Beban Jasa Lainnya	603.054.036	1.063.306.325	(460.252.289)	-43,29%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	21.978.000	(21.978.000)	-100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>15.230.358.772</b>	<b>13.356.646.087</b>	<b>1.873.712.685</b>	<b>14,03%</b>

### D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.946.605.294 dan Rp2.529.367.920. Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp417.237.374 atau 16.50 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan meningkatnya beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Beban Pemeliharaan  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.226.925.069	1.081.602.600	145.322.469	13,44%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	763.515.088	918.844.370	(155.329.282)	-16,90%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	956.165.137	528.726.700	427.438.437	80,84%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	194.250	(194.250)	-100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>2.946.605.294</b>	<b>2.529.367.920</b>	<b>417.237.374</b>	<b>16,50%</b>

#### D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.030.542.540 dan Rp10.943.977.800. Realisasi beban perjalanan dinas per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.086.564.740 atau 28.20 persen dari beban perjalanan dinas tahun anggaran 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat kenaikan pada Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan Beban Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota, dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Rincian beban perjalanan dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Beban Perjalanan Dinas  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.208.456.440	3.602.447.600	1.606.008.840	44,58%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.700.000	47.400.000	(28.700.000)	-60,55%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.975.563.000	2.992.110.000	983.453.000	32,87%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.951.886.500	3.434.479.200	517.407.300	15,07%
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	875.936.600	867.541.000	8.395.600	0,97%
<b>Jumlah</b>	<b>14.030.542.540</b>	<b>10.943.977.800</b>	<b>3.086.564.740</b>	<b>28,20%</b>

#### D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban penyusutan dan amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.216.954.869 dan Rp995.726.008. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.166.788.869	970.643.008	196.145.861	20,21%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	49.825.000	24.912.500	24.912.500	0,00%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Berwujud	341.000	170.500	170.500	0,00%
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.216.954.869</b>	<b>995.726.008</b>	<b>221.228.861</b>	<b>22,22%</b>

## D.2 Kegiatan Non Operasional

Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp36 dan Rp(52.860.701). Surplus/defisit dari kegiatan non operasional 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp52.860.737 dibandingkan tahun 2023.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Kegiatan Non Operasional  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) Rp	%
<b>Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	168.169.799	(168.169.799)	0%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	0%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	168.169.799	(168.169.799)	0%
<b>Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>				
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36	-	36	0%
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	221.030.500	(221.030.500)	0%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36	(221.030.500)	221.030.536	0%
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>36</b>	<b>(52.860.701)</b>	<b>52.860.737</b>	<b>-</b>

## E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode laporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp5.785.481.635 mengalami kenaikan Ekuitas sehingga jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp5.946.840.555.

Tabel 32. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas

*Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN %
1	Ekuitas Awal	5.785.481.635	3.896.117.580	1.889.364.055	0,00%
2	Surplus/Defisit - LO	(41.921.878.413)	(37.074.309.687)	(4.847.568.726)	13,08%
3	Transaksi Antar Entitas	42.083.237.333	38.963.673.742	3.119.563.591	8,01%
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>5.946.840.555</b>	<b>5.785.481.635</b>	<b>161.358.920</b>	<b>2,79%</b>

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 01 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.785.481.635 dan Rp3.896.117.580

### E.2 Surplus / Defisit LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(41.921.878.413) dan Rp(37.074.309.687).

*Tabel 33. Rincian Surplus (Defisit) LO  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.*

Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN Rp	%
Surplus/Defisit dari kegiatan operasional	(36.634.640.705)	(37.021.448.986)	386.808.281	-1,04%
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(5.287.237.708)	(52.860.701)	(5.234.377.007)	0,00%
Pos luar biasa	-	-	-	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>(41.921.878.413)</b>	<b>(37.074.309.687)</b>	<b>(4.847.568.726)</b>	<b>13,08%</b>

### E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.083.237.333 dan Rp38.963.673.742. rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Tabel 34. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Transaksi Antar Entitas	Jumlah
1	Ditagihkan dari entitas lain	45.825.351.176
2	Diterima dari entitas lain	(2.749.335.393)
3	Transfer Masuk	(992.778.450)
<b>Jumlah</b>		<b>42.083.237.333</b>

### E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp161.358.920 dan Rp1.889.364.055.

### E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.946.840.555 dan Rp5.785.481.635.

